

# MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 6, No.1, Juni 2020

ISSN: 2476-9320

# MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

Vol. 6, No. 1 Juni 2020

- Pembina** : H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Dra. Hj. Nelly  
Syamsurijal, S. Ag. M.Si.  
Dr. Sabara, M. Phil.I  
Sitti Arafah, S. Ag, MA.
- Editor/Penyunting** : Prof. Dr.H. Abd. Kadir Ahmad, MS.  
Paisal, SH.  
Muh. Ali Saputra, S. Psy  
Muh. Dachlan, SE. M.Pd.
- Kesekretariatan** : Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.  
Asnianti, S. Sos.  
Zakiah, SE.  
Azruhyati Alwy, SS.  
Dr. Elce Yohanna Kodina, M.Th.
- Layout** : Zulfikar Kadir, SH.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar  
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222  
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982  
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

## SALAM REDAKSI

Mimikri dalam edisi ini mengangkat tema Moderasi Beragama. Tema ini sengaja dipilih untuk menggemakan moderasi beragama lebih nyaring lagi. Sebagaimana kita pahami bersama, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berkubang dengan maraknya paham-paham keagamaan yang intoleran bahkan ekstrem. Laman berbagai pemberitaan di media *online* dihiasi dengan ajaran-ajaran keagamaan yang intoleran dan penuh dengan ujaran kebencian. Dalam situasi semacam itu, maka ceramah-ceramah yang sejuk, informasi yang menenangkan dan tulisan-tulisan yang mengusung kedamaian dan moderasi beragama patut dimasifkan.

Moderasi beragama sendiri adalah sikap keberagamaan yang memilih posisi di tengah-tengah. Tidak mengambil posisi ekstrem di salah satu sisi; radikal di sisi satunya dan liberal pada sisi yang lainnya. Tentu moderasi beragama, bukanlah menggampangkan agama, misalnya karena atas nama kebebasan, lalu harus memungguni prinsip-prinsip agamanya sendiri. Sebaliknya moderasi beragama adalah sikap sungguh-sungguh menjalankan ajaran agama, sembari di saat yang sama terbuka untuk berdialog dengan agama lain.

Jika sikap seperti yang disebutkan tadi yang dimaksud dengan moderasi beragama, maka seharusnya “*all religions are inherently moderate.*” Tetapi sayangnya dalam praktiknya tidak semudah mengucapkannya. Di Indonesia sendiri tantangan untuk menerapkan moderasi beragama ini tidaklah mudah. Kendati demikian, berbagai pengalaman-pengalaman dan praktik yang berkembang di masyarakat memberikan harapan yang cukup besar. Harapan bahwa moderasi beragama akan menjadi *mainstream* beragama di Indonesia.

Beberapa tulisan dalam mimikri kali ini menggambarkan beberapa model-model moderasi beragama yang dipraktikkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski di antara itu ada pula yang memperlihatkan tantangan moderasi itu sendiri. Salah satunya yang memperlihatkan tantangan atas moderasi beragama, tepatnya moderasi Islam termuat dalam tulisan pertama yang disajikan oleh Muhammad Nurkhoiron: “*Liberalisasi Sebagai Moderasi Islam Dalam Masyarakat Pasca Sekuler.*” Tulisan ini mempertanyakan kemajuan Islam moderat saat ini di tengah gemuruhnya Islam politik yang sedang semangat mencari celah penyatuan agama dan negara.

Sementara itu tulisan Sabara yang menyoal Paradigma dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Konteks Kebangsaan menunjukkan kerentanan dari keragaman di Indonesia pasca reformasi. Dengan penelusuran literatur, Sabara mengemukakan keretakan-keretakan dalam kemajemukan kita karena semakin menguatnya politik identitas pasca reformasi. Karena itulah menurutnya, moderasi beragama menjadi alternatif keberagamaan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang religius-nasionalis ini.

Tulisan selanjutnya dari Syamsurijal mengenai *Santri yang Berdamai dengan Tradisi Lokal*, menyajikan satu fakta yang cukup unik, yakni kenyataan bahwa pesantren *salafi* yang selama ini dituduh konservatif, intoleran dan anti tradisi, malah berjalan sebaliknya di pesantren-pesantren *salafi* di Polewali Mandar (Polman). Melalui kiai atau *Annang Guru*, pesantren *salafi* justru menjadi penjaga tradisi atau tepatnya menjadi semacam *the main connecting link* antara Islam dan tradisi lokal.

Berikutnya ada tulisan Sitti Arafah: *Pengarustamaan Kearifan Lokal dalam Moderasi Beragama; Meneguhkan Kepelbagaian*. Tulisan ini menitik beratkan pentingnya tradisi atau kearifan lokal yang ada di banyak tempat di Indoensia ini dalam menopang kehidupan beragama yang moderat. Kearifan lokal yang bersumber dari ajaran leluhur sejatinya banyak mengandung ajaran tentang moderasi ini. Tinggal kini bagaimana ajaran tersebut kembali direvitalisasi agar tidak kehilangan elang vitalnya dalam kehidupan beragama masyarakat.

Setelah tulisan Siti Arafah, Muh Rais muncul dengan tulisan yang lebih konseptual. Ia menjelaskan konsep moderasi Islam yang disebut dengan *washatiyah*. Tulisan berjudul “*Mengarus Utamakan WasathiyahIslam: Antara Doktrin dan Praksis Sosial*”, berkuat dengan bagaimana Islam memandang *wasatiyah* berdasarkan sumber-sumber yang otoritatif, misalnya pandangan Al-qur’an, Hadist maupun pendapat ulama. Kendati tulisan semacam ini telah banyak ditulis oleh berbagai pakar, tetapi tetap terasa penting, khususnya untuk kepentingan sosialisasi secara masif isu moderasi Islam.

Tulisan yang juga mengemukakan pengalaman moderasi beragama muncul dalam: “*Warung Kopi Jalan Roda; Merekam Ingatan Kolektif dan Merawat Toleransi*”. Tulisan Irfan Syuhudi menunjukkan Warung Kopi bisa menjadi ruang publik tempat perjumpaan berbagai kalangan. Warung Kopi di Jalan Roda di kota Manado telah menjadi ruang semacam itu. Di tempat itulah toleransi disemai dalam bentuk-bentuk diskusi dan dialog-dialog yang konstruktif.

Mimikri untuk edisi kali ini ditutup oleh Paisal yang menulis soal “*Kerukunan Beragama dan Dinamika kebangsaan di Wilayah Perbatasan Indonesia-Papua*.” Tulisannya menunjukkan bahwa masyarakat Papua di daerah perbatasan menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan beragama. Tetapi yang lebih menarik, meski mereka sudah sering melintas batas dan berbaur dengan masyarakat Papua Nugini, tetapi Komitmen Kebangsaannya tidak hilang.

Walhasil, apakah setuju dengan ide-ide yang tercetus dalam tulisan ini atau tidak, itu semua terpulang ke pembaca sekalian untuk menyelami tulisan-tulisan dalam jurnal ini. Pada akhirnya redaksi mengucapkan: “Selamat membaca....!”

# MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

Vol. 6, No. 1 Juni 2020

## DAFTAR ISI

\_\_\_\_ **MUHAMMAD NURKHOIRON** \_\_\_\_

LIBERALISASI SEBAGAI MODERASI ISLAM  
DALAM MASYARAKAT PASKA SEKULER

Halaman 1 - 16

\_\_\_\_ **SABARA** \_\_\_\_

PARADIGMA DAN IMPELEMENTASI MODERASI  
BERAGAMA DALAM KONTEKS KEBANGSAAN

Halaman 17 - 35

\_\_\_\_ **SYAMSURIJAL** \_\_\_\_

SANTRI YANG BERDAMAI DENGAN TRADISI LOKAL:  
MELONGOK MODERASI BERAGAMA  
DI LINGKUNGAN PESANTREN SALAFI

Halaman 36 - 57

\_\_\_\_ **SITTI ARAFAH** \_\_\_\_

PENGARUSUTAMAAN KEARIFAN LOKAL DALAM MODERASI BERAGAMA;  
MENEGUHKAN KEPELBAGAIAN  
(SEBUAH PRAKTIK PADA MASYARAKAT PLURAL)

Halaman 58 - 73

\_\_\_\_ **MUHAMMAD RAIS** \_\_\_\_

WASATHIYYAH ISLAM: ANTARA DOKTRIN DAN PRAKSIS SOSIAL

Halaman 74 - 95

\_\_\_\_ **MUH. IRFAN SYUHUDI** \_\_\_\_

WARUNG KOPI JALAN RODA; MEREKAM INGATAN  
KOLEKTIF DAN MERAWAT TOLERANSI

Halaman 96 - 112

\_\_\_\_ **PAISAL** \_\_\_\_

KERUKUNAN BERAGAMA DAN KOMITMEN KEBANGSAAN  
DI WILAYAH PERBATASAN PAPUA

Halaman 113 - 130

## **KERUKUNAN BERAGAMA DAN KOMITMEN KEBANGSAAN DI WILAYAH PERBATASAN PAPUA**

*Paisal*

Peneliti Balai Litbang Agama Makassar  
Jalan AP. Pettarani No. 72 Makassar  
Email: umar.faisal@rocketmail.com

### **Abstrak**

Tulisan ini berupaya mengeksplorasi semangat kebangsaan, kehidupan dan kerukunan keagamaan di wilayah perbatasan negara antara Republik Indonesia dan Papua Nugini yang merupakan sebuah hasil penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan pada 2019. Penelitian dilakukan di wilayah perbatasan negara, tepatnya di Kecamatan Muara Tami, Jayapura, Papua, yang memiliki karakteristik khas dalam dinamika sosial, kebudayaan, ekonomi, politik, dan keagamaan. Penelitian ini menunjukkan, paham kebangsaan masyarakat perbatasan Muara Tami terlihat cukup bagus. Pada umumnya berjiwa nasionalis, dan mencintai Indonesia. Kerukunan dan relasi keagamaan internal umat Islam dan dan eksternal dengan agama lain di Muara Tami terjalin cukup baik. Umat Islam banyak berdomisili di wilayah Muara Tami. Yang menarik, tidak ada wacana keagamaan yang tampak dominan di dalam kehidupan beragama masyarakat perbatasan, baik Islam maupun Kristen. Tradisi dan ritual keagamaan masih kental pada upacara sosial (pernikahan, khitanan, maulidan) di wilayah ini. Penelitian ini juga menemukan adanya beberapa kelompok yang menganut pemahaman agama eksklusif cenderung radikal dan anti nasionalisme, diantaranya dengan kehadiran Jafar Umar Thalib, Laskar Jihad serta aktifitas kelompok HTI.

***Kata Kunci: Kerukunan, kebangsaan, perbatasan negara, Muara Tami, Jayapura***

### **PENDAHULUAN**

Posisi geografis Indonesia memiliki wilayah perbatasan laut maupun darat dengan negara lain. Wilayah perbatasan bukan sekadar batas fisik-geografis negara, dan bukan hanya aspek ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan. Wilayah perbatasan adalah sebuah lintas batas dan pertemuan berbagai silang budaya dan keagamaan. Hal tersebut berpengaruh terhadap kehidupan kebangsaan dan keagamaan masyarakat Indonesia yang mendiami wilayah perbatasan.

Berdasarkan posisi tersebut, wilayah perbatasan menjadi area sangat dinamis, dikarenakan perjumpaan yang interaktif dan langsung dengan wilayah dan masyarakat negara tetangga. Di wilayah perbatasan nasionalisme masyarakat Indonesia diuji karena berhadapan dengan nasionalisme warga negara lain, atau perspektif dan wawasan kebangsaan yang dimiliki masyarakat Indonesia di perbatasan diperhadapkan pada fakta pembanding dari apa yang terjadi di negara tetangga.

Selain perkembangan paham kebangsaan, dinamika kerukunan keagamaan di wilayah perbatasan juga menarik untuk dieksplorasi lebih jauh berkenaan paham dan kelompok keagamaan apa yang berkembang pada masyarakat perbatasan, serta kaitan antara dinamika keagamaan dengan kebangsaan pada masyarakat perbatasan. Relasi dinamika keagamaan dan kebangsaan di wilayah perbatasan, karena sebagai wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, daerah perbatasan menjadi rentan terhadap masuknya ideologi-ideologi asing atau paham keagamaan trans-nasional yang tidak selalu paralel dengan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Bahkan, daerah perbatasan disinyalir menjadi lalu-lintas persenjataan oleh teroris lintas negara. Pengembangan sumber daya manusia di bidang pelayanan keagamaan di daerah perbatasan relatif lebih rendah jika dibanding dengan daerah-daerah lain, demikian pula minimnya ketersediaan *resources* keagamaan yang dapat menangkal pengaruh ideologi asing, utamanya ideologi yang berbasis paham keagamaan tertentu (Abidin [ed], 2015).

Di wilayah perbatasan RI dan Papua Nugini di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom, beberapa tahun terakhir terakhir bercokol kelompok Laskar Jihad (LJ), pimpinan Ja'far Umar Thalib (JUT), dan beberapa kali

melakukan gerakan dan tindakan keagamaan yang radikal dan dianggap kontroversial, dan beberapa kali memicu konflik dengan masyarakat lokal Papua. Keberadaan LJ pimpinan JUT di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini dikhawatirkan membawa paham keagamaan Islam radikal yang sangat mengancam kerukunan umat beragama, sekaligus integritas bangsa di Papua. Sebagaimana diketahui, masyarakat asli Papua mayoritas adalah non Muslim. Oleh karenanya, kehadiran kelompok LJ pimpinan JUT, yang menyebarkan paham radikal di wilayah tersebut akan rentan menimbulkan konflik horizontal, yang dapat merembet pada konflik antarpenganut agama.

Tulisan ini berupaya mengeksplorasi semangat kebangsaan dan kerukunan keagamaan di wilayah perbatasan negara antara Provinsi Papua dan Papua Nugini, yang merupakan sebuah hasil penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan pada 2019. Penelitian dilakukan di wilayah perbatasan, tepatnya di Kecamatan Muara Tami, yang memiliki karakteristik khas dalam dinamika sosial, kebudayaan, ekonomi, politik, dan keagamaan

**Kerukunan Beragama dan Semangat Kebangsaan Perbatasan Muara Tami Jayapura**

Sebagai ujung tombak pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan, di Distrik Muara Tami terdapat Kantor Urusan Agama yang dulunya masih dalam wilayah layanan KUA Distrik Heram, saat ini masih menumpang di Kantor Kelurahan Koya Timur karena belum memiliki kantor definitif Di wilayah Muara Tami terdapat 2 buah pesantren, pesantren Hidayatullah terletak di Holtekamp dan pesantren Darul Ilmi di Kampung Bugis, juga wilayah Holtekamp. Pesantren Hidayatullah terdaftar dalam data Ponpes Kementerian Agama sedangkan Darul Ilmi tidak terdaftar. Selain itu terdapat MIN (setingkat SD) Koya Barat dan MIS Integral Hidayatullah. Pada tingkat menengah pertama terdapat MTS Persiapan Negeri Koya Barat, MTSS YAPNI, MTS Hidayatullah dan sebuah Madrasah Aliyah Hidayatullah. Pada wilayah Muara Tami terdapat 37 Buah Mushollah dan 8 buah Masjid. terdapat 3 orang penyuluh non PNS dan tidak ada penyuluh agama Islam berstatus PNS.

Kementerian Agama (Kemenag) Kota Jayapura berperan dalam membangun dan merawat semangat kebangsaan masyarakat perbatasan serta membina kerukunan umat beragama melalui peran-peran yang dilaksanakan oleh masing-masing kepala seksi bimas

agama, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan penyuluh agama. Secara khusus memang belum ada program terkait nasionalisme. Yang dilakukan Kemenag sejauh ini adalah melakukan pengawasan kepada para khatib yang akan menyampaikan khutbah Jumat di masjid-masjid di Kota Jayapura. Di antara para khatib itu adalah orang-orang kemenag sendiri, antara lain, kepala KUA dan penyuluh agama. Jadi, setiap pekan dan bahkan selama satu bulan, pihak kemenag sudah mengantongi nama-nama khatib yang akan mengisi khutbah Jumat di semua masjid di Jayapura.

Nama-nama, latar belakang pendidikan, dan organisasi khatib, juga diketahui oleh kemenag. Hal ini untuk mengantisipasi khatib menyampaikan khutbah Jumat berisikan anti nasionalisme, radikalisme, serta intoleran. Bila ketahuan ada khatib membawakan ceramah Jumat tentang ajaran anti nasionalisme, radikalisme, dan ujaran-ujaran kebencian yang bisa memicu ketegangan antarumat beragama, ia akan dimasukkan ke dalam daftar “khatib yang patut diwaspadai”, dan boleh jadi, tidak akan mendapatkan izin lagi untuk berkhotbah di masjid-masjid (Wawancara Kepala Kemenag Jayapura, Syamsuddin, Juni 2019).

Apa yang dilakukan kemenag ini didasarkan atas pengalaman buruk, yang sempat mengancam kerukunan umat



beragama. Suatu waktu, Ustad HTI pernah mengisi ceramah Jumat di salah satu masjid di Kota Jayapura. Dalam ceramahnya, sang khatib lantas menjelek-jelekkan sistem pemerintahan sekarang, dan memprovokasi jamaah untuk ikut berpikiran buruk terhadap pemerintahan. Untungnya, ceramah ustad HTI itu mendapat reaksi keras umat muslim. Seusai shalat Jumat, beberapa jamaah masjid yang ikut Shalat Jumat di masjid itu, nyaris memukul khatib tersebut. Pengurus masjid juga merasa kecolongan mengapa Ustad HTI bisa mengisi khutbah Jumat di masjidnya. Akibat peristiwa ini, Kemenag Jayapura kemudian menyeleksi ketat nama-nama khatib yang akan mengisi ceramah Jumat di setiap masjid.

Menurut Kepala Kemenag Jayapura, Syamsuddin, pihak kemenag tidak membatasi materi khutbah Jumat yang akan dibawakan khatib. Hanya saja, ia mengimbau khatib menghindari tema-tema yang sifatnya provakator, dan bisa memicu sikap intoleran. Syamsuddin juga mengimbau kepada Kepala Seksi Bimas Kristen dan Kepala Seksi Bimas Katolik agar memberitahukan penyuluh agama ASN dan penyuluh non ASN, supaya mereka menyampaikan tema-tema atau pesan-pesan damai kepada jemaatnya.

FKUB Kota Jayapura cukup berperan terkait penanaman wawasan kebangsaan. Hanya saja, sifatnya kasuistik.

Misalnya, bila terjadi peristiwa yang bisa melahirkan perpecahan antarwarga, FKUB baru turun tangan. Mereka lalu mengimbau kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, di daerah masing-masing untuk menjaga kerukunan antarumat beragama dan persatuan. Pada saat inilah, FKUB menekankan tentang makna nasionalisme, dengan mengimbau supaya tidak terpancing dengan ulah provokator yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan. FKUB di Jayapura dan pemerintah setempat patut diapresiasi dalam meredam konflik. Mereka sejauh ini selalu bertindak cepat mengatasi ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat.

Populasi umat Islam di wilayah ini adalah yang terbanyak dengan jumlah pemeluk 11.064 jiwa. Pada distrik ini juga terdapat 5 buah paroki/stasi milik umat Katholik dengan jumlah umat 3.763 jiwa (Data Seksi Bimas Katholik Jayapura). Rumah ibadat Kristen di distrik muaratami tercatat 27 buah dengan jumlah umat 6.652 jiwa.

Umumnya, penduduk Muslim di kawasan Muara Tami adalah penganut aliran Islam moderat. Secara kultural mayoritas merupakan warga NU dengan berislam Aswajah Annahdliyah. Tradisi NU dibawa dan diperkenalkan seiring dengan masuknya penduduk beragama Islam di wilayah ini. Penganut NU

mayoritas berasal dari pulau Jawa dan Bugis Makassar. Kedatangan warga muslim Jawa diawali dari program transmigrasi pada tahun 1983-1984, transmigran ini kemudian diberikan lokasi di Distrik Muara Tami tepatnya di kampung Koya Timur.

Kedatangan transmigran memacu pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut, beberapa wilayah kampung di sekitar kemudian semakin padat diantaranya Koya Tengah dan Koya Barat. Pola permukiman pada kedua kampung tersebut bercampur dengan penduduk dari etnis dan agama berbeda. Saat ini Mayoritas penduduk beragama Islam bermukim di Koya Timur, Koya Barat dan Koya Tengah serta Holtekamp. Bentang alam pada wilayah kampung tersebut memang terhitung datar sehingga cukup baik untuk dijadikan wilayah permukiman dengan ketersediaan sumber air yang berasal dari perbukitan sekitar serta air tanah. Hal ini memicu tingginya minat penduduk non Papua Asli untuk membeli lahan di Muara Tami.

Keberadaan warga Islam yang mayoritas di Distrik Muara Tami selama ini amat jarang memicu terjadinya silang sengketa dengan penduduk setempat karena corak keberagaman yang dianut adalah corak Islam damai yang ramah dengan perbedaan. Beberapa tahun silam kemudian mulai muncul corak keagamaan

berbeda yang dianut sebagian kecil pendatang yang juga ikut bermukim di wilayah tersebut. Awalnya keberadaan jamaah kelompok jamaah Istiqomah dan salafi Darul Ilmi tidak banyak menyita atensi khalayak, hingga kehadiran Ust. Jafar Umar Thalib (JUT) pada akhir tahun 2015 lalu.

Kehadiran JUT di tanah Papua pada awalnya ditengarai karena terjadinya pembakaran Musholla di Tolikara. Doktrin jihad yang dianutnya menuntun untuk ikut membela umat Muslim yang diisukan dizalimi di Papua. Kasus Tolikara yang terjadi pada bulan syawal 2015 memang menjadi isu menarik untuk melihat sejauhmana relasi umat Islam yang mayoritas etnik pendatang dengan penduduk sekitar yang non Muslim. Kasus tersebut kemudian dapat diselesaikan dengan bijak dan damai tanpa menimbulkan aksi kekerasan dengan skala yang lebih luas dan massif. Bangunan kedamaian yang selama ini terjalin dengan baik menjadi modal kuat untuk melakukan rekonsiliasi dengan elegan tanpa harus melakukan pertumpahan darah.

JUT yang telah melakukan perjalanan panjang dari Pulau Jawa kemudian menetap dan diterima oleh sebagian penduduk Muslim yang sealiran di daerah Muara Tami. JUT datang bersama 30 orang (ada yang menyebut 50) pengikutnya. Dari penelusuran penulis,

JUT yang memiliki hubungan dengan Ust. Abdul Hadi seorang alumni Gontor yang juga disebut sebagai murid JUT. Abdul Hadi membangun Pesantren Darul Ilmi di Kampung Bugis, Holtekamp, Distrik Muara Tami pada sekitar tahun 2011. Sebuah pesantren yang bercorak salafi dan dikenal cukup konservatif dan tertutup oleh penduduk Muslim setempat. JUT memanfaatkan jaringan pesantren ini untuk meluaskan pengaruhnya dan diterima oleh penduduk Muslim setempat.

Dengan jaringan ini perlahan JUT membangun jamaahnya dan kemudian aktif melakukan kajian rutin di Masjid Muhajirin Koya Barat. Pengajian rutin ba'da subuh berlangsung beberapa tahun hingga Februari 2019. Aktifitas JUT kemudian berakhir dengan penangkapan dalam sebuah insiden dugaan tindak pidana kekerasan dan pengrusakan terhadap warga non Muslim dan rumahnya yang memutar lagu-lagu rohani menggunakan speaker bersuara keras dan dianggap mengganggu kajian di dalam masjid.

Jafar Umar Thalib (JUT) populer dengan sepak terjangnya sebagai Panglima Laskar Jihad yang kemudian ikut menceburkan diri dalam kancah konflik bernuansa SARA di Ambon dan Poso. Hal inilah yang memicu terjadinya penolakan terhadap kehadirannya di Tanah Papua, bagi mereka kehadiran JUT justru akan

mengusik kedamaian di tanah Papua, bahkan disebutkan bisa mengaktifkan militansi kelompok anti NKRI dan menjatuhkan Papua ke dalam kancah pertikaian bernuansa SARA. Keberadaan JUT kemudian menarik perhatian Gubernur dan Kapolda Papua yang turut memberikan komentar. Walikota Jayapura bersama unsur Muspida kemudian melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas kehadiran JUT. Kementerian Agama bersama tim FKUB kemudian menggali informasi soal alasan kedatangan JUT di tanah Papua. JUT kemudian menyampaikan maksud kedatangannya untuk membangun pesantren pada sebuah lahan di Muara Tami dan belakangan rencana tersebut dipindahkan pada lokasi wakaf seorang warga muslim di Arso 14 Kabupaten Keerom.

Meski JUT telah mengemukakan tujuannya, kedatangannya yang bersamaan dengan insiden Tolikara setelah melakukan beberapa kali demonstrasi dan penggalangan dana jihad di pulau Jawa dan jaringan Internasional tetap menuai penolakan. Mantan Ketua Majelis Muslim Papua H Arobi Aitarauw mengungkapkan bahwa peristiwa pengrusakan rumah warga yang diduga dilakukan oleh mantan Panglima Laskar Jihad Indonesia JUT dan pengikutnya pada Rabu tanggal 27 Februari 2019 bukan kali pertama terjadi

di Papua. Ia menyebutkan, insiden serupa sudah terjadi dua hingga tiga kali.

"Ini pernah terjadi pada 2015," ucap ustaz Arobi. Menurut ustaz Arobi, insiden yang melibatkan JUT dan pengikutnya di Kelurahan Koya Barat akhir Februari lalu sangat mencoreng rasa persaudaraan antarumat beragama di Papua. Ia pun mendesak ada langkah tegas terhadap keberadaan Jafar di Bumi Cenderawasih. "Pimpinan umat Islam di Papua sepakat bahwa JUT ini harus dievakuasi ke luar Papua atau kata kasarnya diusir ke luar dari Papua," ujarnya di Jayapura, Ahad. Ustaz Arobi mengatakan ormas Islam berharap setelah proses hukum terhadap kasus pengrusakan rumah warga selesai, Jafar harus dikeluarkan dari Papua. Ia juga menuntut agar pesantren JUT yang ada di Koya dan Arso ditutup. "Karena bisa mengembangkan paham radikal," ucap Arobi.

Sementara itu, Ketua MUI Provinsi Papua KH Syaiful Islam Al Payage menyatakan tekadnya untuk ikut turun ke jalan bersama warga Nasrani yang akan menggelar aksi damai pada Senin (4/3). Sebagai bentuk simpati, ia akan hadir bersama tokoh Papua, di antaranya Thaha Al Hamid. "Kami akan mendorong untuk mengedepankan toleransi antarumat beragama dan kami akan mengawal proses hukum karena apa yang dilakukan oleh JUT bukan mewakili umat Muslim," kata Kiai Syaiful. (*Republika Online*, 4 Maret 2019)

Sebelumnya, seperti dikutip dalam laman yang sama, organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Provinsi Papua pada Ahad malam telah menyatakan dukungannya atas proses hukum oleh Kepolisian Daerah (Polda) Papua terhadap

Jafar. Kiai Syaiful mengatakan masyarakat Muslim dan Nasrani menanti proses hukum terhadap kasus tersebut. Ia mengingatkan, insiden perusakan rumah warga di Koya Barat oleh kelompok JUT adalah kriminal murni. "Jangan sampai (warga) dikecewakan," katanya, didampingi Ketua ICMI Papua Dr Mansur, Ketua NU Kota Jayapura H Kahar Yelipele, Dewan Penasihat Majelis Muslim Papua H Arobi Aitarauw, dan Ketua Badko Musyawarah Ulama Provinsi Papua Idrus Hamid. Kiai Syaiful juga menjelaskan, bahwa umat Muslim di Papua sangat mendukung keberagaman, kedamaian, kenyamanan dan saling menghargai antara satu agama dengan yang lainnya. Berkumpulnya para ulama Papua untuk memberikan pernyataan sikap bersama ini menjadi cerminannya. Pertemuan ormas Islam tersebut juga dihadiri oleh Ketua KAHMI Papua Muh Idrus, Sekum Bakomudin H Abdul H Jusuf, Ketua HMI Cabang Jayapura Hariyanto Rumagia, dan mantan Ketua DPP KNPI Rifai Darus, serta tokoh Papua Thaha Al Hamid.

Beberapa kali aktivis mahasiswa Kristen yang tergabung dalam PMKRI juga melakukan aksi menuntut JUT diusir keluar dari tanah Papua dan dikembalikan ke tanah asalnya. Ketua FKUB Kota Jayapura, William Itaar (wawancara: Jayapura, Juli 2019) mengungkapkan

*“Tanah Papua adalah tanah yang damai karena itu berdasarkan kesepakatan semua tokoh agama adalah menolak kehadiran paham keagamaan garis keras di kota ini untuk menjamin terjaganya kedamaian itu”*. Menurutny selama ini tidak pernah terjadi penolakan terhadap orang atau kelompok yang ingin hidup di tanah Papua apapun agamanya, tapi kali ini terjadi karena rekam jejak kekerasan yang telah dilakukan JUT selama ini. William Itaar juga mengatakan apapun agamanya, karena dalam semua agama ada kelompok radikal jika dia berpotensi meruntuhkan bangunan kedamaian harus ditolak kehadirannya di tanah Papua.

Habib Thaha Al Hamid (wawancara, Juli 2019) mengurai secara mendetail tentang kondisi keagamaan dan kebangsaan di Kota Jayapura dan Papua pada umumnya dan khusus menyoroiti kehadiran JUT dengan Laskar Jihadnya serta keberadaan HTI:

Terkait JUT ini sudah keputusan toh sidang, 5 hari kah, (penulis menyebut 5 bulan tapi Cuma menjalani sisa masa tahannan 11 hari) saya keberatan, seperti sidangnya hanya main-main. Tapi ya begitulah ketika dalam ruangan belajar hukum dagang, yakinlah diluar hukum diperdagangkan. Tapi menurut saya kehadiran JUT ini pada satu sisi bisa mengganggu relasi antar umat dan bisa pula mempererat silaturahmi, jadi dinamik, kami makin bersatu untuk melawan kelompok radikal seperti ini, jadi itu juga fakta. Dan mungkin tidak lama klo JUT akan

kembali kesini. Nah terkait sebelum dia kesini dia sempat demo-demo dulu di Jakarta sebelum lolos kesini itulah saya mau bilang jangan terlalu fokus mengenai dampak di masyarakat tapi lihat juga relasinya keatas. Siapa yang kasi dia datang, siapa yang biyai, klo gak yaa susah mendalami anatominya, susah. JUT itu orang dekatnya Tito, waktu Tito jadi ka Densus itu di Jogja baru selesai Poso, Ketapang, Ambon dan lain. Karena dia sel teroris maka dia menjadi “senter” buat tito. Tito sendiri bercerita ke saya bahwa dia dekat dengan JUT karena kedekatannya dengan teroris ini.

lebih lanjut Habib Thaha menjelaskan penolakan warga Jayapura (Papua) yang memang menolak proses peradilan terhadap JUT dilakuka di Jayapura untuk mengantisipasi bahaya kedatangan laskar yang ditengarai akan terus melakukan aksi demonstrasi dan hal itu tentu akan mengganggu kedamaian di tanah Jayapura. Menurutny relasi antar umat beragama di Jayapura biasa saja, kadang terjadi gangguan dan lebih banyak damainya. Kedatangan JUT ini menimbulkan gejolak yang cukup mengganggu terjadi apa yang dia sebut ‘like and dislike’ di tengah-tengah umat. Hal itu disebabkan karena JUT dan jamaahnya mulai masuk ke masyarakat, masjid dan melakukan diskusi atau pengajian tertutup.

Habib Thaha menengarai kedatangan JUT melalui proses pembiaran atau bahkan dibiayai oleh oknum tertentu. Ia melihat JUT tak punya sumberdaya apa-apa lagi

tapi mampu memberi insentif gurugurunya di pesantren dan mampu bergerak leluasa (sebelum adanya insiden dengan non muslim), ia juga mempertanyakan darimana JUT memperoleh dana untuk membeli tanah di Arso, ditengarai jaringan internasional salafi juga bermain mengingat JUT adalah mantan Taliban.

Terkait keinginan JUT dan laskarnya untuk berjihad di Tolikara, Habib Thaha sebagai sekjen presidium Papua Merdeka memberi peringatan bahwa hal itu justru akan membantu mempercepat Papua Merdeka. Kedatangan laskar sipil ini dapat dijadikan isu internasional bahwa indonesia tak mampu lagi mengamankan Papua maka dia mengirimkan laskar sipil untuk menghadapi kelompok separatis Papua.

Menurutnya agama bisa mempererat dan memperlemah relasi kebangsaan di tanah Papua ini. Ia melihat terdapat beberapa kelompok keagamaan yang membawa faham aneh yang justru mengusik kedamaian tanah Papua. Dia mencontohkan kasus pelarangan pembangunan masjid yang terus didaur ulang dan dise bar di tengah-tengah umat Islam. Dia menganggap justru yang berbahaya yang diluar Papua yang tidak memahami tentang Papua lalu berteriak paling kencang.

Perhatian pemerintah Indonesia di pusat juga menjadi sorotannya hal ini

karena menurutnya tidak terjadi pola perubahan kebijakan dan pendekatan kepada warga Papua. Masalah Papua adalah masalah yang cukup kompleks dan perlu pendekatan yang lebih humanis. Program Growth Centre yang digagas pemerintah dinilainya gagal karena tidak diikuti dengan pola pembinaan manusia Papua, maka muncullah masalah Tolikara. menurutnya itu karena pemerintah tidak membangun manusia di daerah itu. Perkembangan satu manusia tidak diikuti dengan baik, itu yang terjadi di Tolikara, mereka tidak siap dengan kepelbagaian. Habib Thaha berharap jangan mengusik tanah Papua dengan kelompok intoleran, selayaknya para Habaib (datuknya) yang membawa Islam Humanis di tanah Papua. Dia bahkan bereaksi sangat keras terhadap keberadaan kelompok HTI yang mencoba meraih simpati warga Papua.

Yang menarik, beberapa keluarga muslim di wilayah Holtekamp yang tidak sepakat dengan aktivitas Salafi Darul Ilmi yang bersifat konservatif eksklusif dan terhubung ke JUT tidak mau menyalurkan zakatnya ke Pesantren tersebut dan memilih menyalurkannya di masjid atau badan amil zakat yang lain (Wawancara Ust. HB, Juli 2019). Warga ini cukup gerah dan merasa terganggu karena kehadiran kelompok ini menyebabkan umat Islam yang mayoritas pendatang beraktifitas mencari nafkah di

tanah Papua dicurigai, bagi mereka ini seperti membangunkan macan tidur mengingat Orang Asli Papua bisa terpicu militansinya untuk melakukan perlawanan dan akibat terburuknya adalah isu pemisahan diri dari NKRI.

Beberapa tahun sebelumnya, kehadiran paham transnasional kelompok HTI cukup lama melakukan aktifitasnya di Kota Jayapura. Selain aktif melakukan kajian di beberapa masjid yang tersebar di penjuru wilayah Kota Jayapura, HTI juga beberapa kali melakukan aksi unjukrasa menyikapi berbagai isu lokal, nasional maupun internasional. Dengan memanfaatkan jaringan jamaah salafi dan LDK, HTI terbilang cukup berhasil mempengaruhi warga untuk menyepakati perjuangan mendirikan Khilafah dan menolak NKRI. Sebuah masjid megah di permukiman warga padat penduduk muslim di Kotaraja (Abepura) menjadi pusat aktifitas HTI di Kota Jayapura (Wawancara:Toni Wanggai Juli 2019). Di Muara Tami mereka aktif kajian di Masjid Muhajirin dan beberapa masjid lain. Mereka juga menyebar bulletin Al Islam pada semua masjid di Kota Jayapura. Terhitung beberapa PNS hingga guru-guru agama Islam, pengurus ponpes yang menjadi aktifis kelompok ini. Sebelum dibubarkan HTI termasuk sangat leluasa menyebarkan fahamnya karena aktifitasnya yang dikemas dalam bentuk

dakwah, dengan gaya aksi yang santun, serta ditunjang kepiawaian berbicara.

Beberapa masjid cukup terbuka memberikan ruang dengan alasan untuk kepentingan dakwah dan pembinaan umat Islam. Pengurus masjid Muhajirin Koya Barat (Hidayat Hi Gani: Wawancara, Juli 2019) mengatakan sangat sulit menolak kehadiran kelompok sejenis HTI dan JUT beserta jamaah salafinya untuk beraktifitas di masjid. Aktifitas dakwah mereka perlahan kemudian diminati warga hingga meluas kepada beberapa masjid dan kegiatan keagamaan sekitar. Menurut Hidayat selama ini penduduk Muslim hidup damai dengan yang berbeda agama dan etnis di lingkungan masjid, tak pernah terjadi gangguan terhadap aktifitas ibadah oleh penduduk non muslim sekitar, kehadiran JUT lah yang kemudian memicu gangguan dari yang berbeda agama.

KH. Kahar Yelipele (Ketua Tanfidziyah NU Kota Jayapura, Ketua Pengurus Masjid Agung Jayapura, wawancara Juli 2019) banyak bercerita tentang keberadaan Muslim Papua dan kondisi keberagamaannya:

Kami di Papua tidak membedakan NU dan muhammadiyah, beberapa amaliyah kultural NU misalnya diikuti juga oleh orang muhammadiyah, tapi kalau kita lihat perkembangan Islam akhir-akhir ini jumlahnya sudah cukup signifikan bahkan di masjid raya ini, khususnya di Muara Tami ini kebanyakan Islam disana ini orang

non Papua, begitu juga di Kab. Keerom itu kita liat jumlah presentasinya cukup tinggi namun itu dari trans (transmigrasi) yang dulu sampe sekarang cukup banyak di wilayah Koya dan sekitarnya. Tantangan dakwah di Papua ini adalah masuknya paham radikal ini, yang lebih sulit untuk kami hadapi itu adalah masuknya JUT di Muara Tami. Saat itu juga banyak laskarnya yang masuk. Tapi setelah musyawarah dengan berbagai ormas agama termasuk yang Kristen kemudian pada saat itu kebetulan ada kasus dan beliau sudah keluar. Secara umum toleransi di Papua ini berjalan sangat baik. Bahkan saya sendiri pernah menjadi ketua panitia natal sampai saya disebut ee itu Ustad Kahar itu sudah mau pindah aliran atau apalah. Saya bilang saya ini percaya hati nurani saya, yang bisa membedakan itu dengan baik sehingga saudara tidak bisa menilai saya dari luar. Terkait kelompok radika ini masuk ke pendidikan juga, bahkan ada itu yang dari ponpes Darul Maarif di Abe (pura) yang HTI juga.

Menurut Kyai Kahar toleransi di Papua berjalan baik bahkan ia sering menyampaikan dalam pengajian dan ceramah bahwa agama di Papua adalah agama keluarga yang berusaha merangkul semua karena umat Islam di tanah Papua berasal dari berbagai etnis. Ia menilai kehadiran JUT di Muara tami ini tidak terlalu berpengaruh namun memicu kekhawatiran yang akhirnya cukup berlebihan. Hal ini disebabkan JUT ini dalam ceramahnya itu sering menjelekkan agama lain misalnya ia mengatakan “itu

umat Nasrani itu adalah kafir”. Menurut Kyai Kahar itu harus diklarifikasi bahwa ketika ayat itu diturunkan oleh Allah dalam Alquran itu sesuai dengan konteks zamannya ada sebab akibatnya ada asbabun nuzulnya. Kyai Kahar melanjutkan bahwa usaha umat Islam itu adalah menunjukkan bagaimana Islam yang baik, dengan akhlak dan adabnya. seseorang tidak bisa memaksakan orang lain harus ikut Islam. Dalam konteks ini menurutnya kita tidak bisa memberikan cap orang lain itu kafir, tidak boleh begitu dan tidak sesuai dengan pemahaman Islam yang benar.

Ia mencontohkan di dataran tinggi Wamena dalam soal pembangunan masjid musholla itu bisa berjalan baik bahkan dia menyaksikan orang Kristen itu setelah pulang dari gereja datang ke pembangunan masjid sampai menangis karena terharu melihat saudaranya. Hal itu menurutnya menjadi tanda bahwa perbedaan agama di Papua berjalan aman, rukun dan damai. Data yang ia miliki menunjukkan bahwa di muara tami tidak terdapat OAP Muslim. Umat Islam di Muara Tami kebanyakan pendatang. Secara presentase OAP muslim di pegunungan jumlahnya terbilang sedikit. Muslim Wamena hanya sedikit dibanding misalnya dari Papua pantai. Demikian OAP suku asli Jayapura tidak terdapat data penganut agama Islam. Adapun OAP



muslim yang ada itu berasal dari Sorong, Raja Ampat dan dari pegunungan Walesi yang mencapai sekitar 69 KK di Kota Jayapura. Ia menilai perkembangan Islam sampai hari ini di Papua cukup baik.

Terkait dengan beberapa kasus yang dianggap sementara kalangan cukup mengganggu relasi antar umat diantaranya persoalan musholla di kantor pengadilan bisa dinilai secara parsial. Menurutnya Walikota Jayapura saat ini sangat perhatian terhadap kasus ini. Ia bersama barisan Islam Moderat berjalan bersama berusaha menjadikan kota jayapura ini sebagai kota harmoni awal. Walikota Benhur Tommy Mano memang dikenal cukup perhatian terhadap umat islam bahkan dalam bulan ramadhan safari masjid keliling hingga dalam perayaan hari raya idul adha, maulid dan sebagainya.

NU memiliki sejumlah agenda untuk menangkal kelompok radikal dengan mengedepankan kebersamaan, toleransi, persatuan untuk menjaga NKRI tetap utuh di tanah Papua. NU kami selalu mengedepankan komunikasi (tabayyun) untuk menjaga keamanan di Papua, sehingga di Papua sampai hari ini tetap damai. Diantara beberapa program NU Jayapura adalah melakukan pengajian keliling masjid karena melihat kelompok radikal HTI salafi ini tidak punya masjid tapi mereka ingin mau mengambil alih

masjid orang NU, ingin mau kuasai masjid muhammadiyah, ingin mau kuasai masjid pemerintah. Program pengajian keliling sampai ke wilayah Abepura tepatnya di Masjid Alhikmah Tanah Hitam. Selain itu ritual keagamaan warga NU juga tetap dilestarikan dengan rutin mengadakan yasinan, tahlilan, sholawatan. Bahkan mengundang Gus Anom dari Sidoarjo dalam pengajian majelis Taklim secara bersama.

Pengurus NU Jayapura juga secara terbuka menyampaikan kepada pihak Kemenag Kota Jayapura bahwa jadwal khatib untuk kota Jayapura ini harus selektif dan jangan sampai ada ustadz HTI yang diberi ruang. Ia juga menganjurkan PNS yang terafiliasi HTI oleh pimpinan kemenag harus diberi sanksi, ditahan kenaikan pangkatnya jika tak mau mengakui NKRI. Kyai Kahar mengaku memiliki data aktivis HTI di Jayapura dan ada yang berstatus PNS.

Persebaran HTI memang cukup massif dan nampak terkoordinir dengan baik. Di Masjid Agung Jayapura sebelum kepengurusan Kyai Kahar Yelipele kelompok anti Pancasila dan NKRI ini sempat melakukan kegiatan. Selain HTI ada banyak faham radikal yang masuk ke Kota Jayapura dalam bentuk kelompok kecil dan NU Kota Jayapura mengupayakan membentengi warga muslim dari faham radikal tersebut dengan

terus menerus mengkampanyekan Islam moderat. Pengaruh paham radikal ini berbahaya karena kesalahfahaman warga di luar Papua yang tidak memahami persoalan Papua dengan baik.

Pasca pembubaran HTI dan kehadiran JUT di Jayapura, Kementerian Agama, FKUB bersama beberapa instansi terkait melakukan pemantauan terhadap aktifitas dakwah untuk membendung konten radikal mempengaruhi warga dan bisa berakibat memburuknya relasi antar umat dan antar etnis di tanah Papua (Wawancara Ka. Kemenag Jayapura: H. Syamsuddin, Juli 2019). Selain itu Kemenag melalui Bimas Islam mengeluarkan surat edaran dan menghimbau untuk melaporkan jika ada penceramah atau khatib dari luar yang akan melakukan ceramah dan pengajian. Seorang dai bercerita selalu dihubungi oleh pihak Kemenag dan instansi negara yang lain untuk menjaga konten kedamaian dan menurutnya itu baik karena ada cukup banyak isu atau materi dakwah lain yang bisa disampaikan untuk membangun umat (Wawancara; Ust. Sukman, Juni 2019).

Pada wilayah tapal batas yang bersentuhan langsung dengan PNG yakni Kampung Skouw Sae dan Kampung Mosso sebagian besar dihuni oleh penduduk beragama Kristen dan Katholik,

adapun yang beragama Islam pada umumnya merupakan pendatang yang bertugas di wilayah tersebut dan beberapa keluarga yang membeli tanah kemudian menetap di lokasi tersebut. Pada 3 kampung Skouw dan Mosso memang merupakan wilayah adat suku Skouw, suku ini wilayahnya melintasi batas Negara dan terdapat beberapa pemegang hak tanah ulayat warga Indonesia dan tinggal di Indonesia namun tanahnya berada di PNG, begitu sebaliknya.

Di Kampung Mosso terdapat beberapa keluarga penganut Katholik yang rutin menyeberang ke wilayah PNG untuk melakukan ibadah, selain memiliki hubungan kekerabatan dengan warga PNG, penduduk PNG di wilayah Wutung memang dominan Katholik. Beberapa bulan silam umat Katholik bersama Bimas Agama Katholik Kementerian Agama Kota Jayapura melakukan kegiatan keagamaan dan kesehatan di wilayah Mosso dengan melibatkan Remaja, Pemuda dan umat Katholik dari Negara tetangga tersebut (Hendrikus Harun; wawancara, Juli 2019). Aktifis Gereja Katolik juga aktif melakukan pembinaan kesehatan terhadap warga di tapal batas tanpa melihat agamanya. Untuk memperkuat kecintaan terhadap bangsa dan Negara Indonesia umat Katholik terbiasa menyanyikan lagu kebangsaan

Indonesia Raya dalam setiap kegiatan maupun ibadah keagamaannya.

Gusniati Taslim (Wawancara, Juli 2019), Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Muara Tami bercerita tentang Muara Tami:

Menyambut perayaan Kemerdekaan RI, pemerintah Distrik Muara Tami melakukan berbagai kegiatan, sebelum puncak acara diadakan berbagai kegiatan dan lomba. Sejak beberapa tahun terakhir Upacara bendera dilakukan di lapangan distrik muara tami, sebelumnya masih bergabung dengan kota karena pertimbangan berbagai factor utamanya terkait keamanan.

Menurut Gusniati Taslim sejak beberapa tahun silam dilaksanakan upacara 17 agustus menggunakan 2 bahasa yakni bahasa Indonesia dan bahasa virgin (Bahasa Inggris dialek PNG). Upacara tersebut juga bahkan pernah mengundang beberapa pejabat dari PNG. Upacara tersebut melibatkan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, perangkat kampung (aparat desa), para pegawai, guru dan anak sekolah.

Gusniati Taslim lebih lanjut menuturkan “kami menggunakan dua bahasa ini supaya masyarakat faham, karena kayak dari kampung Mosso itu kan masih banyak yang belum tau bahasa Indonesia, mereka lebih fasih menggunakan bahasa PNG, karena kan pulang balek ke sebelah, mereka juga satu rumpun keluarga. Tahun ini (2019) kami

merencanakan akan memusatkan kegiatan di lapangan Pos Lintas batas tapi masih menunggu persetujuan dari pihak keamanan (TNI/POLRI) dananya dibiayai oleh distrik”.

Warga kampung tapal batas cukup senang dengan keramaian perayaan 17-an. Mereka juga sangat berminat mengikuti perlombaan yang diadakan, misalnya panjat pinang ini cukup membludak pesertanya, adajuga karnaval budaya papua, tarik tambang dan lainnya. Selain itu ada perkemahan anak pramuka di lapangan disrik. Pihak pemerintah distrik juga cukup sering melakukan kegiatan yang diharapkan bisa menanamkan kecintaan terhadap bangsa, selain upacara 17-an agenda rutin tahun juga dilaksanakan dalam rangka memperingati penyatuan Papua ke Republik Indonesia pada tanggal 1 mei. Saat ini sedang dilakukan seleksi Paskibra di sekolah-sekolah yang nantinya kemudian dilatih oleh pihak Koramil dan Polsek Muara Tami pada awal Agustus.

Warga kampung Mosso ini berbeda dengan Skouw, Mosso adalah satu rumpun keluarga dengan warga PNG tepat disebelahnya, itulah sebabnya secara bahasa mereka sama. Bahasa Skouw meski ada kosakata yang sama namun cukup berbeda dengan Mosso. Festival Cross Border yang diadakan Kementerian Pariwisata dua kali setahun ini merupakan

salah satu cara untuk menarik pengunjung dari PNG dan menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, selain di Skouw juga diadakan di Keerom dengan menggunakan artis serta genre musik local Papua.

Soal OPM cukup sering ada yang menyerahkan diri, kontak senjata beberapa tahun belakangan ini hanya di pegunungan. Ada yang masih memakai identitas ganda, selain memiliki KTP Indonesia dia juga merupakan warga Negara PNG. Aparatur pemerintah agak kesulitan soal ini karena tidak bisa dipungkiri mereka juga merupakan rumpun keluarga yang sama dengan PNG.

Khusus penduduk Muara Tami ada kartu merah yang bisa digunakan untuk melintas batas, persyaratannya Kartu Keluarga, Akta Nikah, dan atau Keterangan Domisili. Kartu merah ini dikeluarkan oleh imigrasi. Aturannya dalam melintas perbatasan ini tidak boleh bermalam, adapun jika menginap harus ada izin dari Pemerintah.

Yang menarik, dagangan dari PNG paling hanya sosis, kornet domba, ada juga pinang, semua disebelah serba makanan kaleng, banyak dari Australia. Warga PNG mengkonsumsi semabko dan sayuran dari Indonesia, telur juga sangat laku dibeli oleh mereka makanya para pedagang bahkan banyak yang berasal dari Sulsel membawa telur untuk dijual di

pasar, mereka menggunakan kuli angkut, gerobak.

Nilai mata uang PNG (Kina) terbilang sangat rendah dan pada beberapa waktu bisa tiba-tiba menghilang dari pasar. Warga PNG memang banyak berbelanja menggunakan kina di wilayah di Indonesia. Itulah sebabnya dalam amatan penulis cukup banyak reklame kampanye transaksi menggunakan kina di wilayah PNG agar mata uang tetap stabil. Dulu cukup ramai penyeberang dari PNG yang belanja misalnya sembako, saat penulis berada di tapal batas nampak sepi dari para pelintas PNG, mungkin dibatasi aturan. PNG bahkan pernah menutup batas karena mata uang disana habis digunakan belanja di Indonesia.

Kemegahan tapal batas kini dimenangkan Indonesia, dulu pos batas ini kecil saja, kini dilengkapi berbagai sarana penunjang yang cukup modern, dulu beberapa kali pos batas PNG masih bisa bersaing. Pemilik tanah di pos tapal batas itu malah warga PNG, jadi tanah di Indonesia (Muara Tami) banyak yang pemiliknya orang PNG. Menurut Gusniatai, warga mosso yang tepat di tapal batas berjumlah 300an KK. Mereka juga ada banyak yang berwarga negara ganda dgn PNG, datang berkebun tidak menetap, karena itu ada wacana untuk disatukan saja dengan kampong skouw, terlalu

dipaksakan untuk dibuat satu kampung sendiri.

Kehadiran kelompok Islam radikal dianggap cukup meresahkan. Gusniati Taslim mengungkap kekesalan warga. “Kita juga sebenarnya dengan kehadiran JUT kita dirugikan semua, karena kasus begitu kan tapi diluar sana masih jadi isu yang bisa mengganggu kerukunan warga, infonya berkembang semakin liar dan ini adalah kasus yang kedua dilakukan JUT jadi sangat merugikan kami warga muslim juga warga pendatang khususnya di Wilayah Koya.” Relasi warga Muslim pendatang dengan penduduk asli tak pernah terganggu dengan masalah etnis maupun agama, orang Jawa juga cukup disenangi oleh warga setempat.

Pada umumnya warga transmigran Jawa sampai beberapa tahun silam itu cukup sering melaksanakan acara tradisional mereka, misalnya nanggap wayang. Begitupun dengan tradisi keagamaan misalnya hajatan, tahlilan, dan juga yasinan. Warga Bugis pun begitu, kegiatan sunatan, pernikahan menggunakan tradisi Bugis Makassar itu sudah biasa karena itu cukup banyak penyewaan *lamming* atau perangkat acara tradisi Bugis khususnya Koya Barat, Koya Timur. Adapun orang Jawa mereka berasal dari Jawa timur, barat, dan Tengah. Tapi memang dalam persebaran penduduknya

hanya di Koya tengah yang terdapat penduduk OAP.

Saat ini, dengan banyaknya proyek pembangunan infrastruktur di wilayah Papua, terkhusus yang berbatasan langsung dengan PNG, wilayah ini makin banyak diminati oleh para investor baik untuk pembangunan perumahan, pabrik dan usaha peternakan, pertanian serta perkebunan. Banyak tanah yang dimiliki dan dikelola oleh orang Bugis Makassar serta dari daerah lain, tanah tersebut dibeli dengan harga yang cukup murah dan kini dengan akses jalan yang mulus hingga beberapa pelosok kampung di tapal batas nilai lahan bisa melonjak berlipat. Dengan pelayanan membaik banyak warga Papua asli yang kini cukup bangga menjadi Indonesia dan merasa lebih diperhatikan oleh Negara, mereka membandingkan dengan Negara tetangga PNG yang termasuk Negara miskin.

## **PENUTUP**

Berdasarkan paparan di atas, disimpulkan secara umum, bahwa paham kebangsaan masyarakat perbatasan Muara Tami terlihat cukup bagus. Mereka umumnya berjiwa nasionalis, dan mencintai NKRI. Hal ini diperkuat pula dengan peran lembaga-lembaga negara, seperti Kantor Distrik Muara Tami, Kementerian Pariwisata, TNI, dan aktivitas individual, yang terus berupaya

menanamkan nasionalisme kepada masyarakat perbatasan.

Kerukunan dan relasi keagamaan internal umat Islam dan dan eksternal dengan agama lain di Muara Tami terjalin cukup baik. Umat Islam paling banyak berdomisili di Muara Tami. Namun, menariknya, tidak ada wacana keagamaan yang tampak dominan di dalam kehidupan beragama masyarakat perbatasan, baik Islam maupun Kristen. Tradisi dan ritual keagamaan masih kental pada upacara sosial (pernikahan, naik rumah, sunatan) di wilayah ini. Hal ini menunjukkan, sebagian besar umat Islam menganut Islam tradisional, yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Ini diperkuat pula dengan pengakuan sejumlah informan. Meski begitu, Jamaah Tabligh dan LDII juga ada di Muara Tami, tetapi gaungnya kurang terdengar. Kehadiran HTI, Laskar Jihad, JUT dan kelompok salafi wahabi menjadi persoalan yang cukup mengganggu relasi intern dan antar umat beragama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal [ed]. 2015. *Pelayanan Keagamaan Masyarakat di Daerah Perbatasan Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Arikunto, Suharsini *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Kasniyah, Naniek. *Tahapan Menentukan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ombak. 2012.
- Kohn, Hans. *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*. Jakarta: PT. Pembangunan dan Erlangga. 1984.
- Kusuma, Bayu Mitra Adhyatma. "Radikalisme di Asia Tenggara: Dinamika Relasi Agama, Konflik, dan Kebijakan Publik. Disampaikan pada Kuliah Umum Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada tanggal 15 November 2016.
- Kusumawardani, Anggraeni dan Faturrochman. "Nasionalisme". *Jurnal Buletin Psikologi*. Volume XIINomor 2 tahun 2004. Hal 61-72.
- Republika Online*, Diakses 4 Maret 2019  
Mardawani,Agusta Kurniati. "Model Pembinaan Rasa Kebangsaan Melalui *Citizenship Education* pada Masyarakat Entikong Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume II Nomor 1 Juni 2017. Hal 41-47.
- Masnyah, Agus. "Nasionalisme Masyarakat Indonesia di Perbatasan dan Dampaknya terhadap Kedaulatan Negara (Studi di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Peperangan Asimetris*. Volume

- III Nomor 3 Desember 2013. Hal 17-39.
- Moeldoko. 2014. *Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan)*. Disertasi pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Shoban, S. R dkk. 2017. *Relasi Nasionalisme dan Globalisasi Kontemporer; Sebuah Kajian Konseptual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Shihab, Umar, 2005, *Kontekstualitas Al-Qur'an*, Cet. III, Jakarta: Penamadani.
- Syafrudin, 2009, *Paradigma Tafsir Tekstual Dan Kontekstual (Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yahya, Ahmad Syarif, 2017, *Ngaji Toleransi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Yasid, Abu, 2014, *Islam Moderat*, Jakarta: Erlangga.